

**PERSPEKTIF AMERIKA
HUBUNGAN AMERIKA-INDONESIA :
KASUS PRRI DALAM EMPAT
MEDIA CETAK
*New York Times, Washington Post,
Wall Street Journal, Time***

Oleh : Retno S. Mamoto, Ph.D

LU

Pendahuluan : Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia pada masa Sukarno

Pada masa pemerintahan Presiden Eisenhower, kebijakan politik luar negeri Amerika ditentukan oleh Presiden dan menteri luar negeri, John Foster Dulles. Pengaruh kedua orang ini amat besar di dalam menentukan langkah-langkah kebijakan politik luar negeri, dibarengi dengan kekuasaan dan dukungan keuangan sehingga langkah-langkah yang diambil dalam hubungan Amerika dengan Indonesia berkembang menjadi suatu kebijakan yang rahasia dan membawa dampak yang merugikan dan mengakibatkan hubungan diplomasi kedua negara ini terputus. Di satu sisi, Presiden Amerika menghadapi Kongres yang tidak selalu sepakat dengan kebijakan-kebijakan politik luar negerinya, namun di sisi lain, mendapat dukungan penuh dari kedua unsur dalam kongres yakni dari senat dan DPRnya, untuk kebijakan yang bersifat non-kompromi terhadap komunisme. Dalam area ini Eisenhower menjalankan kekuasaannya sebagai presiden, terutama dalam hal menggunakan Badan Intelijens "Si-Ai-E" (CIA) untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negerinya.

Kebijakan politik luar negeri Amerika pada masa Eisenhower dikenal dari kebijakan-kebijakannya yang bersifat rahasia ("cover") terutama dalam menangani masalah dengan komunisme. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Amerika berkisar di satu pihak dengan memberikan bantuan luar negeri sedangkan di pihak lain melaksanakan sub-

versi, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang baru merdeka. Konggres sendiri di satu pihak kurang mendukung kebijakan untuk memberi bantuan luar negeri karena para senator umumnya merasa bahwa Amerika akan sangat terbebani.

Eisenhower memilih untuk menggunakan "Si-Ai-E" yang menurut ahli sejarah dari Universitas Cornell Walter LaFeber, karena banyak sekali keuntungannya, selain tidak memakan dana yang besar, tidak diketahui oleh orang banyak (rahasia), cepat dilaksanakan, dan yang lebih penting tidak perlu melalui persetujuan konggres. Demikianlah, bahwa presiden sendiri yang langsung membawahi kegiatan-kegiatan CIA, dengan berhubungan langsung dengan direktornya yaitu Allen Dulles, adik dari Menteri Luar Negeri John Foster Dulles. Operasi rahasia yang biasa dilakukan pada masa Perang Dunia II, oleh presiden Eisenhower pada masa pemerintahannya dijadikan sarana utama untuk mengimplementasikan politik luar negerinya Delapan belas bulan setelah pemerintahan Eisenhower terbentuk, pemerintahan dari dua negara, Iran dan Guatemala, telah berhasil ditumbangkan. Mohammad Mosadeq, seorang negarawan nasionalis yang menjadi perdana menteri pada tahun 1953, dikaitkan oleh pihak Amerika, dengan partai komunis di Iran, Tudch. Mossadeq berhasil disingkirkan dan diganti oleh Mohammad Reza Syah Pahlevi, seorang yang ditumbuhkan oleh CIA (rekrut). Syah Pahlevi ini harus tetap mengalihkan hasil minyak Iran ke Amerika dan bukan ke sebaliknya yaitu ke Rusia. Keberhasilan CIA di Iran ini kemudian dilanjutkan ke Guatemala, yang pada tahun 1954, berhasil menggulingkan presiden Guatemala, seorang nasionalis yang bernama Jacobo Arbens Guzman. CIA menempatkan rekrutnya yaitu Jendral Carlos Castillo Armans. Dalam kasus di kedua negara ini, Eisenhower dan Dulles yakin bahwa Mosadeq dan Arbens telah menjadi komunis (LaFeber 519). Armans adalah seorang diktator yang menindas rakyatnya dalam kemiskinan namun ia mendukung gerakan politik luar negeri Amerika yang mengutuk gerakan internasional dari komunisme. Kasus Guatemala ini menunjukkan bahwa CIA sangat efektif dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri Eisenhower-Dulles.

Usaha negara adikuasa Amerika dan Rusia untuk mencanangkan pengaruhnya di negara-negara lain, termasuk Indonesia, menyebabkan konflik yang terjadi dalam negeri Indonesia meruncingkan persaingan antara Amerika dengan Rusia, dan negara-negara dalam blok komunis.

Indonesia, sebagai bekas jajahan Belanda, dalam masa Sukarno telah memilih untuk menjalankan politik luar negeri yang netral, artinya bersikap "sama" terhadap Amerika dan Rusia (blok komunis). Namun sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah Amerika sangat memperhitungkan sikap pemerintah Indonesia, apakah pro Amerika atau anti, dan sedapat memperhitungkan sikap pemerintah Indonesia, apakah pro Amerika atau anti, dan sedapat mungkin mendorong agar pemerintah Indonesia lebih cenderung sepakat dengan pemerintah Amerika daripada kepada Rusia.

Pada tahun 1953-1956 Amerika memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara yang memihak kepada Amerika. Terutama dalam hal ini adalah kesepakatan negara-negara penerima bantuan luar negeri untuk memerangi komunisme. Setelah Perang Dunia II berakhir, para komunis menggantikan nazi, dan mereka menjadi musuh bagi demokrasi. Brands, seorang sejarawan, mengatakan bahwa Amerika sedang menghadapi negara-negara Dunia Ketiga yang dengan demikian berusaha mencanangkan pengaruhnya kepada negara-negara berkembang untuk memerangi komunisme. Kekuatan di Dunia Ketiga seperti nasionalisme yang meliputi seluruh gerakan untuk mencapai kemerdekaan, dipandang oleh Amerika sebagai perwujudan dari gerakan komunisme internasional. Thomas Noer mengatakan bahwa Dulles, dalam hal ini Eisenhower juga, menyamakan revolusi kemerdekaan dengan revolusi komunis. Oleh karena itu, Amerika mendirikan SEATO (Southeast Asian Treaty Organization) yaitu suatu wadah bagi negara-negara Asia untuk mengikuti kebijaksanaan politik luar negeri Amerika yang anti komunis, dengan menerima bantuan dan perlindungan dari militer Amerika Serikat. Pemerintahan masa Eisenhower ini jelaslah berorientasi pada kekuatan militer serta mempersiapkan dalam bentuk semaksimal mungkin untuk memerangi komunisme di luar negeri. Tekanan pada hal ini dalam pemerintahan Eisenhower sendiri menimbulkan dua kubu yang bertentangan, yaitu pihak pembuat kebijakan yang cenderung untuk memberikan bantuan militer di satu pihak, dan di pihak lain, kalangan pembuat kebijakan yang ingin memberikan bantuan luar negeri.

Negara yang bersikap netral seperti Indonesia harus menghadapi posisi yang sulit, karena bantuan luar negeri hanya diberikan pada negara-negara yang menjadi pendukung kebijakan politik luar negeri

Amerika. Demikian juga halnya dengan bantuan militernya. Kongres sendiri terbagi dua dalam sikapnya terhadap Indonesia dan dalam kebijakan-kebijakan politik luar negeri Eisenhower lainnya. Para senator Demokrat dan para bankir yang konservatif dan anti komunis cenderung untuk memberikan prioritas bantuan luar negeri kepada Indonesia. Bagi mereka ini Indonesia bukan negara komunis, walaupun tidak pro blok Barat. Mereka berpendapat bahwa bantuan luar negeri diberikan untuk menumbuhkan perdagangan, atau dalam bentuk pinjaman investasi. Gagasan-gagasan ini namun tidak pernah terlaksana karena perkembangan dalam negeri Indonesia telah menyebabkan pimpinan dalam pemerintahan Amerika berasumsi bahwa pemerintah Sukarno akan menjadi pemerintahan yang komunis.

Eisenhower terhadap Indonesia

Hubungan Amerika-Indonesia pada masa Eisenhower dibentuk oleh politik dunia, para pembuat kebijakan yaitu konggres, dan presiden sendiri. Politik dunia mempengaruhi kebijakan presiden namun politik dunia itu sejalan dengan ideologi Eisenhower dan Dulles. Keterkaitan antara politik dunia dan politik Amerika ini juga dipengaruhi oleh situasi domestik di Indonesia. Hubungan Amerika-Indonesia, pertama-tama dibentuk oleh geopolitik yaitu pertarungan dalam Perang Dingin dan yang kedua, konflik dalam negeri Indonesia, yaitu antara kekuatan Sukarno dan kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam negeri Indonesia, mendorong ambivalensi pada para pembuat kebijakan di Amerika untuk memberikan bantuan ekonomi atau militer. Dan yang ketiga, peran aktif dari CIA untuk melakukan subversi, yaitu suatu cara yang resmi dalam pemerintahan Eisenhower, telah mendorong gerakan anti Sukarno sejak 1953. Lawan-lawan politik Sukarno yang menentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkonsolidasi sedemikian rupa sehingga terbentuknya pemerintahan yang memberontak dan revolusioner terhadap pemerintah yang resmi pada tahun 1958.

Walaupun Presiden dan para penasihat politik luar negerinya semuanya bersikap anti komunisme, ahli-ahli bantuan luar negeri menentang keputusan presidennya. Mereka menginginkan agar Amerika berperan aktif di negara-negara miskin. C.D Jackson misalnya, penasihat President dalam bidang perang psikologis, mengajukan program ekonomi

dunia. Ia mengikuti anjuran Walt Rostow dan Max Milikan dari pusat studi internasional, di *Massachusetts Institute of Technology*, untuk mendanai sebesar 10 milyar dolar pinjaman ke negara-negara berkembang. Gagasan ini dikemukakan untuk menandingi Rusia yang memprogramkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan Amerika, untuk menolong negara-negara miskin. Menteri Luar Negeri Dulles sekalipun berpendapat dengan Amerika harus menyaingi Rusia dalam mendanai bantuan ekonomi, namun ia tetap berkeras untuk melaksanakan bantuan militer.

Amerika dalam hal menyangani negara-negara berkembang bersikap defensif terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Rusia. Kongres menghadapi tantangan ini yaitu untuk bagaimana bertindak ofensif dalam arti lebih berperan aktif. Kelompok yang mendukung pilihan ini berpendapat bahwa Amerika tidak mempunyai itikad untuk menolong negara-negara miskin supaya lebih baik kehidupannya. Menurut kelompok liberal ini, bantuan militer hanyalah untuk bersaing dengan Rusia dalam konteks Perang Dingin. Sebaliknya dari kelompok ini di dalam kongres, yaitu kelompok konservatif seperti menteri keuangan George Humphrey, wakil menteri luar negeri Herbert Hoover, Jr. dan senator Republikan William Jenner dari Indiana, sama sekali tidak melihat kegunaan dari pemberian bantuan ekonomi. Kelompok liberal dalam kongres ini dipelopori oleh Harold Stassen, direktur administrasi untuk bantuan luar negeri, dan Nelson Rockefeller, kepala komite penasihat presiden dalam organisasi pemerintahan. Stassen lebih jauh lagi setuju walaupun negara-negara berkembang tidak bersedia bergabung dalam pakta militer, Amerika harus tetap memberikan bantuan ekonomi. Namun, dominasi kongres yang dikuasai oleh kelompok konservatif, proposal kelompok liberal ini tentu saja tidak disetujui. Karena itulah pendekatan Amerika ke negara-negara berkembang adalah dengan cara pendekatan militer pemberian bantuan ekonomi dikesampingkan. Namun dalam hal dengan Indonesia, kedua pendekatan dilaksanakan, yaitu dengan bantuan militer dan ekonomi, sehingga bagi Indonesia sendiri, sebagai negara yang mengambil langkah netral, menjadi kekuatannya untuk "bermain" dengan Amerika, dan Rusia untuk memperoleh kedua macam bantuan ini.

Di pihak Amerika, kelompok di kongres yang cenderung untuk memberi bantuan militer dan yang menentang untuk memberi bantuan

ekonomi, berpendapat bahwa negara-negara yang bersikap netral itu memainkan posisinya untuk mendapat bantuan dari Amerika dan Rusia. Bagi kelompok yang dominan ini di konggres, tindakan negara-negara netral ini sangat merugikan Amerika. Terutama sekali yaitu bahwa negara-negara netral itu tidak bermaksud untuk loyal dengan Amerika dalam kebijakan membendung komunisme. George Humphrey mengemukakan bahwa negara-negara netral ini akan mempermalukan Amerika dalam geopolitik Perang Dingin. Karena itu bantuan ekonomi kepada negara-negara netral di Asia, termasuk yang ke Indonesia, pada tahun 1954 dikurangi sehingga hanya berjumlah sebesar 205 juta dolar. Tidaklah heran jika dana bantuan Rusia mengalir dengan jumlah yang lebih masif ke negara-negara ini. Proyek-proyek besar bantuan Rusia direalisasi di India, Mesir, dan di Indonesia. Pabrik baja di India dan bendungan Aswan di Mesir dibangun dengan biaya sebesar 91 juta dolar, dan Indonesia khususnya antara tahun 1954 sampai 1959 menerima bantuan sebesar seperempat milyar dolar dari Rusia. Walaupun situasi di negara-negara ini didominasi bantuan Rusia, namun kebijakan politik luar negeri Amerika tetap menjalankan aliran yang konservatif dan sikap netral dari negara-negara ini dianggap melawan kepentingan pemerintah Amerika.

Namun kelompok liberal di konggres tidak menyerah begitu saja. Dengan melalui lobi mereka, presiden Eisenhower dianjurkan untuk menggunakan retorik yang bunyinya menolong negara-negara berkembang. Terutama pada waktu konperensi Asia-Afrika di Bandung akan dimulai, Eisenhower mengakui bahwa Amerika harus melebihi uluran Rusia. Menteri Luar Negeri Dulles mengajukan sejumlah dana bantuan Asia sebesar 10 milyar dolar untuk menunjukkan pada Rusia bahwa Amerika mampu melebihi Rusia. Oposisi di konggres berhasil memotong dana ini menjadi separuhnya, termasuk didalamnya lobi dari Senator William Jenner dari Indiana, yang sama sekali menolak untuk memberi bantuan kepada India dan Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia yang non-blok menantang para pembuat kebijakan di Amerika. Patterson mengatakan bahwa 29 negara-negara netral di Bandung pada tahun 1955 menyatakan bahwa mereka bebas dari tekanan-tekanan negara adikuasa. Representasi dari seperempat penduduk dunia dalam konperensi Asia-Afrika ini mendukung sikap netralisme dan menerima tawaran Rusia untuk bekerjasama. Dengan ini apa yang disebut dengan negara-negara bebas (Amerika dan

negara-negara blok Barat) menjadi kurang populer bila dibandingkan dengan negara-negara komunis. Bantuan Amerika bukanlah satu-satunya sumber dana, dan bantuan Rusia dalam kenyataannya lebih besar daripada yang telah diberikan oleh Amerika. Mayoritas dari kalangan yang berkuasa di Indonesia tidak menyetujui kebijakan politik luar negeri Amerika walaupun ada sekelompok dari kalangan itu yang setuju dengan kebijakan Amerika. Oleh karena itu di kalangan elit kekuasaan di Indonesia terpecah dalam kelompok-kelompok dimana di antaranya menghendaki diterimanya bantuan Amerika dalam bentuk apapun dan walaupun ada ikatannya yaitu berupa komitmen terhadap kebijakan Amerika dalam membendung pengaruh komunisme, termasuk di Indonesia. Bagi kelompok pro-Amerika ini kerjasama dengan Amerika adalah lebih baik daripada menerima bantuan Rusia. Perpecahan di kalangan elit ini kemudian merintis terbukanya langkah tindakan subversi Amerika untuk mendukung kalangan yang menentang kebijakan pemerintahan Sukarno.

Langkah-langkah Tindakan Subversi

Suatu pertanyaan yang timbul di tengah perpecahan di Indonesia dan usaha intervensi Amerika adalah bagaimana sikap dari pembuat kebijakan di Amerika dan para wartawannya. Politik luar negeri Indonesia menolak untuk bekerjasama dengan Amerika yang dirasakan menguntungkan bagi pihak Amerika. Pada tahun 1953-1958 kelompok-kelompok timbul menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Sukarno. Di pihak Amerika, status Indonesia yang anti Amerika, sama sekali tidak dapat diterima. Eisenhower dan Dulles bersikap anti Sukarno. Mengizinkan partai komunis menjadi bagian dalam pemerintahan, bagi Amerika adalah satu bukti bahwa Indonesia telah membuka diri bagi pelebaran komunisme. Tambahan lagi, dengan menerima bantuan luar negeri dari negara-negara komunis, telah membuka perluasan kekuasaan golongan kiri dalam pemerintahan. Eisenhower dan Dulles percaya bahwa Indonesia telah melangkah jauh untuk melebur dengan komunisme. Di dalam pandangan mereka, Sukarno adalah seorang yang tidak perlu dihormati dan kebijakan yang diambil olehnya mengancam nilai Amerika bahwa negara harus beraliran bebas-bebas dari bentuk-bentuk komunisme dan yang lebih penting lagi posisi Sukarno menentang pe-

ngaruh Amerika di kawasan negara-negara yang sedang berkembang.

Selama masa pemerintahan Eisenhower dalam periode yang kedua, politik luar negeri Amerika memasukkan tindakan subversi sebagai agendanya. Tujuan dari tindakan ini adalah mengganti haluan pemerintah Indonesia supaya pro-Barat, yang berarti, pro-Amerika. Pemerintah Indonesia selama ini, yaitu menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis, menjaga jarak dengan Amerika, dan menolak untuk bergabung dengan SEATO, sama sekali tidak dapat diterima. Timbulnya kelompok oposisi yang menentang kebijaksanaan pemerintahan Sukarno mendorong Eisenhower dan Dulles untuk menyingkirkan Sukarno, yaitu dengan mendukung para penantang Sukarno, dan mengharapkan mereka untuk dapat menang. Tetapi kenyataan dari harapan ini tidak sesuai dengan harapan Washington. Para penentang Sukarno tidak terlalu kuat dan tidak terkonsolidasi secara cermat karena kepemimpinannya tidak jelas. Perlawanan yang terjadi antara kelompok penantang Sukarno dengan kelompok Sukarno berakibat yang sangat merugikan bagi nasional Indonesia, sedangkan di Amerika, media-massa menghentikan liputan akibat-akibat dari gerakan perlawanan ini.

Tindakan mendukung para penentang Sukarno ini bagi Amerika sebenarnya membawa akibat yang merugikan juga. Ahli Indonesia, Audrey dan George Kahin mengatakan bahwa kegagalan CIA menggulingkan Fidel Castro tidak begitu merugikan dampaknya bila dibandingkan dengan tindakan CIA di Indonesia. Eisenhower-Dulles kurang memahami situasi yang sebenarnya dari keadaan dalam negeri Indonesia. Hugh Cumming, yang pernah menjabat Duta Besar Amerika di Indonesia pada tahun 1953 telah ditunjuk oleh menteri luar negeri Dulles sebagai penghubung CIA dengan kementerian luar negeri. Ia seorang pendukung gerakan anti Sukarno dan telah membuat asumsi bahwa ketidakpuasan daerah-daerah luar Jawa terhadap pemerintah Sukarno telah cukup kuat. Dengan demikian Washington berkesimpulan bahwa Partai Komunis Indonesia akan dapat dihapuskan dengan segera dan Sukarno dapat ditumbangkan. Yang terjadi adalah bahwa Sukarno dan kabinetnya mampu berkonsolidasi meliputi seluruh wilayah nasional dan menumpas gerakan yang melawan pemerintah dan dinyatakan sebagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Washington mendasarkan kebijakannya dari laporan-laporan intelijen yang dikumpulkan oleh Cumming. Namun beberapa hal yang dianggap tidak berarti dalam lapor-

an Cumming adalah tindakan pemerintah Sukarno dalam mempertahankan dirinya, yaitu menumpas gerakan anti Sukarno, dan informasi yang dikumpulkan oleh kedutaan Amerika dibawah Duta Besar John Allison. Kesalahan yang dibuat oleh Cumming ini menjadi titik tolak kegagalan rencana Washington. Informasi Allison menyatakan bahwa Sukarno adalah pemimpin negara yang utuh walaupun partai komunis diberi tempat dalam politik Indonesia. Audrey dan George Kahin berpendapat bahwa kebijakan politik luar negeri Eisenhower ditentukan oleh sekelompok saja. Kebijakan politik luar negeri Amerika yang penting-penting hanyalah berdasarkan pada keputusan yang dibuat oleh presiden, kementerian luar negeri, dan CIA. Tujuan politik luar negeri Amerika terhadap Indonesia hanyalah satu yaitu menggulingkan pemerintah Sukarno dan diganti oleh pemerintah yang dibangun oleh para penentang Sukarno. Selain itu para pembuat kebijakan itu juga mengharapkan Indonesia dibawah pemerintahan yang baru akan membawa Indonesia pada kubu Amerika.

Amerika mengambil langkah subversi dengan mendukung gerakan anti Sukarno karena yakin bahwa pemerintahan Sukarno tidak sejalan dengan gagasan-gagasan dan harapan-harapan presiden Eisenhower dan menteri Dulles. Kebijakan politik Indonesia mengambil langkah netral, oleh pemerintah Amerika menjadi indikasi bahwa Indonesia mengambil jalur komunisme. Tambahan lagi PKI yang diintegrasikan dalam politik nasional. Menurut Marta Cotham, sejarawan dari Universitas Denver, mengatakan bahwa bagi Eisenhower, hadirnya prinsip-prinsip socialisme atau Marxisme dalam suatu negara, sudah cukup menjadi bukti bahwa negara itu adalah negara komunis. W.W. Rostow berpendapat bahwa keputusan Eisenhower-Dulles pantas juga karena dibawah rejim yang pro-komunis, walaupun hanya dalam retoriknya saja, azas demokrasi tidak akan dapat berkembang. Namun Rostow berpendapat bahwa Amerika, sebagai pengemban azas demokrasi, seharusnya mampu mengatasi tantangan negara-negara komunis yang menarik negara-negara baru itu kek kubunya. Karena itu bantuan Amerika jangka panjang harus diberikan. Di pihak Amerika dan Indonesia, tidak melihat bantuan jangka panjang ini sebagai suatu kemungkinan, namun pada masa pasca konflik yang didukung oleh kelompok anti Sukarno, jalur ini ditempuh dan disepakati sebagai sarana untuk hubungan yang baik. Ciri diplomasi Amerika masa Sukarno dinilai tidak berhasil.

Beberapa kenyataan yang berbeda antara Amerika dan negara komunis dalam hal menarik hati seorang seperti Sukarno, yang peranannya sangat penting dalam menentukan haluan negara Indonesia. Allison mengatakan bahwa demokrasi Amerika sukar diimplementasikan di Indonesia karena Indonesia tidak pernah berada dalam sistim pemerintah yang diwakilkan seperti dalam negara demokrasi Amerika. Sukarno, sebagai seorang yang mencetuskan gagasan yang sangat penting dalam pembentukan negara Indonesia, berpendapat bahwa sistem pemerintahan Amerika tidak dapat memenuhi masalah di Indonesia setelah mencapai kemerdekaannya. Sedangkan sistem komunis Cina dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia yang baru saja merdeka dari penjajahan kolonialisme Barat. Allison berpendapat bahwa Sukarno bukanlah seorang komunis. Cara-cara komunisme dalam memobilisasi rakyat dipandang sangat cocok bagi alam Indonesia, terutama oleh Sukarno, sebagai seorang ideolog. Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil oleh Sukarno sangat berlainan dengan agenda politik luar negeri Amerika yang sibuk dengan anti komunisme.

Kesan apapun yang dilontarkan kepada pemerintahan Sukarno dari pihak Barat, negara Indonesia tetap memberlakukan politik netralnya dan menghapuskan sisa-sisa kolonialisme. Pada Undang-undang Dasar'45 tersebut bahwa Indonesia berperan aktif dalam politik dunia dan menjunjung azas kebebasan, damai, dan keadilan sosial. Merebut kembali Irian Barat dalam agenda politik Sukarno merupakan cetusan dari prinsip-prinsip ini. Dukungan Amerika dari segi pandang Indonesia, sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam berkonfrontasi dengan Belanda. Jika alasan Indonesia, dalam hal ini adalah azas netral sehingga layak untuk meminta bantuan Amerika untuk kepentingan Indonesia mendapat Irian Barat, maka sebaliknya bagi Amerika, ini suatu hal yang tidak masuk akal. Indonesia tidak termasuk dalam wawasan dimana Amerika harus turun tangan apalagi untuk rejim Sukarno. Bagi Amerika, kepentingan Belandalah yang harus dibela. Dalam hal ini, sebaliknya dari sikap Washington, Allison bersimpati terhadap Sukarno. Menurut Allison justru ini merupakan kesempatan bagi Amerika untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Bagi Allison, tuntutan terhadap kembalinya Irian Barat bukan hanya ambisi Sukarno, namun hal itu diingini oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam percakapan antara Sukarno dan Allison, Sukarno berjanji untuk tidak akan menggunakan

kekuatan komunis dalam negerinya jika Amerika bersedia mendukung Indonesia sepenuhnya untuk mendapatkan kembali Irian Barat. Tentu saja Washington tidak memperdulikan anjuran Allison. Menurut Christian Herter, wakil menteri luar negeri, Washington tidak bersedia untuk melakukan hal-hal yang dapat meninggikan derajat Sukarno di mata rakyatnya. Allison menangkap kesan Washington terhadap Sukarno yang negatif yaitu sebagai "playboy," *demagogue*," dan "beyond redemption".

Tentu saja pandangan negatif Washington terhadap Sukarno ini semakin memicu dukungan Amerika kepada kelompok anti Sukarno. Tindakan pemerintah Sukarno memerangi kelompok oposisi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok komunis untuk mencanangkan pengaruhnya yang lebih besar lagi di dalam pemerintahan. Pada waktu itu, rancangan dari pihak komunis tidak terlaksana karena kesigapan dari kabinet Juanda dan kepala staf Angkatan Darat Jendral Abdul Haris Nasution. Kedua tokoh ini menuntun sebagian besar rakyat untuk loyal terhadap pemerintah. Inilah yang tidak dilihat oleh Washington. Washington telah memukul rata pandangannya terhadap Indonesia bahwa karena adanya partai komunis berarti seluruh Indonesia telah menjadi komunis, dan hanya kelompok anti Sukarno saja yang merupakan satu-satunya kekuatan untuk melumpuhkan komunisme dan yang membutuhkan bantuan militer Amerika.

Perbedaan pendapat antara Allison dan Washington dapat dimengerti karena cara memandang Amerika yang sempit yaitu dengan mengambil kesimpulan bahwa Indonesia telah menjadi negara komunis. Apalagi dengan semua bantuan Rusia yang diberikan ke Indonesia. Ironisnya adalah bahwa kekuasaan Washington jatuh juga karena menolak informasi Allison untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Amerika dengan Indonesia. Washington kurang berpengetahuan tentang situasi di Indonesia yaitu dengan mendukung gerakan anti-Sukarno di Sumatera dan Sulawesi karena anggapan bahwa pemerintah pusat yang berkedudukan di Jawa telah menjadi komunis. Allison karena mengemukakan pandangannya yang bersimpati terhadap Sukarno dan Indonesia, mendapat sangsi jabatan. Ia dipindahkan menjadi duta besar di Cekoslovakia. Tugasnya di Indonesia hanya sampai 11 bulan dan misinya untuk merintis hubungan baik Amerika-Indonesia tidak berhasil. Pengenalan Allison akan Indonesia telah dimulai sejak ia ditempatkan di

Jepang sampai perang selesai, dimana ia mengikuti seluruh perkembangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Namun nasihat Allison tidak sejalan dengan sikap dan jalur yang ditempuh oleh Washington.

Sikap dan jalur yang ditempuh Washington selama Eisenhower menjadi presiden, tidaklah beritikad untuk mengangkat pemerintahan Sukarno. Politik luar negerinya dari awal adalah mendorong gerakan anti Sukarno. Dimulai dengan penolakan Indonesia untuk bergabung dengan SEATO. Hal ini sangat merugikan kepentingan Amerika. Lobi kelompok komunis semakin mendapat tempat dalam pemerintahan Sukarno terbukti dengan adanya bantuan Rusia yang semakin meningkat. Washington bertambah yakin bahwa sikap netral Indonesia adalah identik dengan komunisme. Konggres yang dikuasai oleh kelompok konservatif, telah mewarnai sikap keras Amerika. Akibatnya, pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara netral khususnya pada tahun 1956-1957 menurun, walaupun presiden Eisenhower berjanji sebelumnya, yaitu pada waktu menjelang dibukanya konperensi Bandung untuk meningkatkan bantuan ekonominya. Sikap keras terhadap pemerintahan Sukarno ini suatu bukti juga bahwa Amerika memang bertekad untuk mendukung gerakan anti Sukarno. Tidak heran jika antara 1953-58, Indonesia hanya menerima satu kali pinjaman untuk membeli dari Amerika, senjata-senjata ringan dan beras. Di satu pihak, di permukaan, hubungan diplomatik dua negara Amerika-Indonesia pada masa Eisenhower mengalami banyak tantangan, namun di pihak lain, secara rahasia, Amerika dengan kebijakan yang diambil oleh presiden, menggunakan CIA, mendukung gerakan anti Sukarno. Konggres, dalam hal ini, walaupun tidak selalu sepakat dengan usulan presiden, dalam hal anti komunisme, mereka satu. Hak kepresidenan untuk menggunakan CIA memungkinkan tindakan yang "covert".

PRRI dalam 4 Media Cetak

Media cetak adalah representasi dari pandangan masa atau publik di luar kalangan pembuat kebijakan yaitu presiden dan konggres. Media cetak *the New York Times*, *the Washington Post*, *the Wall Street Journal*, dan majalah mingguan *Time*, meliput masalah hubungan Amerika-Indonesia khususnya mengenai PRRI. Keempat media cetak ini termasuk media cetak yang berpengaruh terutama dalam liputan-liputan seputar masalah

hubungan luar negeri. Pandangan atau liputan keempat media cetak ini menjadi suatu bagian penting dalam kajian masalah hubungan Amerika-Indonesia selain mengenaol kebijakan eksekutif dan legislatif. *The Press and the Foreign Policy* oleh Robert Cohen, *All The News That Fits* oleh Herman Dinsmore, dan *In the Shadow of Power* oleh Chalmers Roberst dipakai disini untuk mengkaji hubungan antara politik luar negeri dengan pers.

The New York Times, *the Wall Street Journal*, *the Washington Post*, dan majalah mingguan *Time* dibaca oleh masyarakat yang elit termasuk kalangan pemerintah. William Rivers dalam *The Opinion Makers* menyebutkan bahwa koran *the Times* (singkatan dari *the New York Times*) dibaca oleh setiap pegawai di departemen luar negeri. Badan eksekutif dan kementerian luar negeri mempunyai jaringan informasi sendiri untuk publik. Media di pihak lain juga memiliki jaringannya. Sifatnya adalah bebas dan mempunyai pertimbangan sendiri, lepas dari kebijakan pemerintah. Juga dalam hal hubungan luar negeri, pers dapat menentukan sendiri sikapnya yang seringkali bertentangan dengan pemerintahnya.

Namun satu hal di luar kebebasan institusi pers, hubungan akrab dengan pemimpin sebuah harian dengan pejabat pemerintah menyebabkan suatu harian berpaham sejalan dengan memberi dukungan kepada kebijakan pemerintah terutama dalam soal-soal luar negeri. James Reston, misalnya, pemimpin harian *the New York Times* sangat dekat hubungannya dengan menteri luar negeri Dulles. Oleh karena itu dalam banyak hal mengenai Indonesia, *the New York Times* menghormati presiden Sukarno namun dalam hal keterlibatan Amerika mendukung gerakan anti Sukarno, koran ini tidak mengutuk keterlibatan Amerika. Artikel-artikelnya dibuat seobyektif mungkin yaitu dengan memuat peristiwa demi peristiwa dari sumber pemerintah resmi dan dari sumber para pendukung gerakan anti Sukarno. Demikian juga Henry Luce, ia adalah seorang yang sepaham dengan Dulles. Karena itu dalam soal anti-Sukarno, majalah *Time* sikapnya sama dengan Eisenhower-Dulles. Richard Kluger mengatakan bahwa *the Washington Post* sama dengan majalah *Time* beraliran konservatif. Namun lepas dari paham pimpinan suatu surat kabar, para wartawan tetap mempunyai kebebasan untuk menilai sesuatu peristiwa, lepas dari sikap pemimpin hariannya, atau sikap pemerintahnya, atau pada pemberi sumber. Bagi mereka misinya adalah memberi informasi kepada publik.

Seringkali para jurnalis harus memilih untuk pro dengan kebijakan pemerintah, atau kepentingan publik. Di jaman tahun 50-an, keterlibatan Amerika di luar negeri dengan cara subversi masih merupakan fenomena yang baru. Di satu sisi para jurnalis tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan pemerintah bisa salah dan akibatnya memberikan gambaran yang negatif terhadap negara Amerika, dan di pihak lain yaitu untuk membukanya kepada publik. Pilihan untuk tidak terang-terangan mengutuk suatu kebijakan tertentu amatlah mungkin jika para jurnalis yang terlibat dalam peliputan PRRI mempunyai harapan yang sama dengan para pembuat kebijakan di Washington bahwa kelompok anti Sukarno akan menang. Dalam hal ini James Reston sebagai pemimpin harian the *New York Times* mempunyai harapan yang sama dengan para wartawan harian the *Times* tersebut yang meliput peristiwa PRRI. Para wartawan yang meliput peristiwa ini selain James Reston adalah Elie Abel, Joseph Alsop, Arthur Krock, Joseph Kraft, Harrison Salisbury, Tad Szulc, Dana Adams Schmidt, Tillman Durdin, Bernard Kalb, John Roderick, dan Robert Udick. Mereka ini relatif muda dan kejadian di Indonesia ini menjadi jenjang karier mereka di kemudian hari. Beberapa diantaranya menjadi wartawan dan pengarang buku terkenal terutama dalam masalah hubungan internasional.

Liputan peristiwa PRRI terutama antara Februari sampai Oktober 1958 dalam empat media cetak the *New York Times*, the *Washington Post*, the *Wall Street Journal*, dan *Time* berjumlah 171 tulisan-tulisan. Di bawah ini adalah rangkuman tulisan-tulisan itu secara garis besar dan juga sikap surat kabarnya.

Surat kabar *New York Times* tidak menanggapi kecaman pemerintah Amerika terhadap pemerintah Indonesia. Baru setelah 2 bulan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia diproklamkan pada 15 Februari 1958, Bernard Kalb dari *New York Times* meliput kegiatan-kegiatan pertempuran antara kekuatan Sukarno dan kekuatan PRRI di Padang. Kalb menekankan bahwa kepentingan Amerika di sini adalah merubah orientasi pemerintah Indonesia. Nada dari surat kabar ini menghargai alasan Indonesia memilih sikap netral, namun sebagai institusi yang independen, memilih untuk tidak mengatakan bahwa dukungan Washington atas gerakan anti Sukarno adalah tindakan yang salah. Surat kabar ini berpendapat bahwa penyerbuan pemerintah pusat yang gencar terhadap kekuatan anti-Sukarno, adalah suatu tindakan reaksi terhadap

Amerika. Dalam suasana perang ini, pemerintah Rusia membantu Indonesia dengan mengirim kapal-kapal terbang dan uang pinjaman, dan Cina pun ikut berperan. Tindakannya adalah dengan mengecam Amerika melalui siaran di radio dan memberitakan di koran. Akibat dari ini semua, koran *New York Times* berpendapat bahwa kekuatan komunis di Indonesia semakin mendapat tempat di kalangan publik. Pada liputan bulan Mei, *New York Times* bersama dengan majalah *Time*, mengatakan bahwa medan peperangan berpindah ke Sulawesi; ada pilot asing yang terlibat yaitu dengan menjatuhkan bom di pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat minyak di Indonesia bagian timur, dan pilot ini yang bernama Alan Pope berhasil ditangkap. Kedua media ini menyimpulkan bahwa perang saudara ini justru menempatkan Indonesia, khususnya pemerintahan Sukarno pada posisi "naik panggung" sedangkan Amerika memperoleh citra yang jelek. *New York Times* satu-satunya yang memuat kecaman presiden Sukarno terhadap tindakan subversif Eisenhower dan juga memberitakan tentang Dulles yang menemui duta besar Indonesia di Amerika dan setelah pertemuan itu Indonesia diberi pinjaman untuk membeli senjata.

Sebaliknya, majalah mingguan *Time* paling gencar mempromosikan tokoh-tokoh PRRI walaupun sumber-sumber beritanya berasal dari beberapa kantor berita seperti *United Press* dan *Associated Press*. Dukungan *Time* terhadap gerakan anti Sukarno tidak diragukan lagi. Para wartawan yang meliput mengetahui adanya keterlibatan CIA namun dalam hal ini *Time* sebagai suatu media memilih sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Departemen Luar Negeri, dan keputusan presiden. Walaupun majalah *Time* bersikap membela gerakan anti-Sukarno, namun liputannya mengenai kekuatan anti Sukarno tidak dimanipulasi. Kekuatan anti Sukarno di Sumatera dinilainya sebagai suatu kekuatan yang lemah bahkan dalam bulan April, majalah ini mengatakan bahwa kelompok Sumatera telah berbuat suatu kesalahan dengan melawan kekuatan tentara pusat. Kekuatan antara dua kubu ini tidak seimbang dimana pasukan anti Sukarno tidak dapat mempertahankan diri, melarikan diri ke hutan dan mengadakan penyerangan-penyerangan yang tidak terarah. *Time* memuat liputan yang terbanyak dibandingkan dengan ketiga media lainnya, dan liputannya yang intensif berlangsung dari Februari sampai Juni, dan yang perlu dicatat adalah bahwa *Time* bersama-sama dengan Washington tidak mengantisipasi bahwa kekuatan anti

Sukarno tidak dapat bertahan, dan harus menerima kenyataan bahwa target untuk menggulingkan Sukarno tidak berhasil.

Washington Post mengirim William dan John Griffin untuk meliput di Sumatera. Liputannya tidak berlanjut, berhenti sampai pada saat pertempuran frontal antara pasukan pusat dan tentara PRRI tidak berlangsung lagi. Pemberitaannya sesuai dengan kenyataan yaitu dimana keadaan kekuatan PRRI tidak sekuat kekuatan pusat. Menurut para jurnalis koran *Post* ini, berita-berita yang mengatakan bahwa pasukan PRRI unggul dan berperang dengan gagah berani adalah tidak benar. Dan juga *Post* selalu menyebutkan di dalam berita-beritanya suatu kalimat yang berbunyi : "if confirmed," yang berarti bahwa mereka menyelidiki kebenaran dari setiap berita terutama yang berasal dari kekuatan anti Sukarno. Artinya, koran ini menyampaikan adanya unsur propaganda dari pihak kelompok anti-Sukarno yang melebih-lebihkan kekuatan yang sebenarnya.

Wall Street Journal meliput situasi perang ini dengan menampilkan kedudukan Sukarno yang berhasil dalam mengatasi gerakan PRRI ini. Sifatnya sebagai surat kabar yang bergerak dalam bidang keuangan, *Journal* ini menganjurkan agar Indonesia dibantu dengan bantuan keuangan untuk kepentingan pertumbuhan pasar bagi para investor Amerika. Sikap koran ini yang positif terhadap Sukarno, menyebutkan bahwa bisnis Amerika di Indonesia terutama operasi minyak di Sumatera tidak mengalami hambatan.

Keterlibatan Amerika dalam melancarkan bantuan rahasia terhadap gerakan anti Sukarno adalah suatu kenyataan dari kebijakan politik luar negeri Amerika di masa Perang Dingin. Khususnya dalam hubungannya dengan Indonesia, pada tahun 1957, kongres menyetujui usulan presiden Eisenhower yang disebut dengan "doktrin Eisenhower" yaitu dengan memberikan dana sebesar 10 juta dolar dalam bentuk cek kosong. Program Eisenhower ini dibuat untuk memerangi pengaruh komunisme di negara-negara miskin di Asia dengan berbagai cara seperti memberi pinjaman yang harus dipakai untuk membeli sesuatu dari Amerika, misalnya beras dan senjata, atau menggunakan CIA untuk menggulingkan kepala negara yang tidak suportif terhadap politik Amerika yaitu dengan mendukung gerakan oposisi. Maksudnya adalah agar supaya pemerintahan yang baru tidak ragu-ragu lagi menjadi suatu pemerintahan yang pro Amerika. Gerakan anti Sukarno pada tahun 1958

ini gagal, dan presiden Sukarno semakin bertambah kekuasaannya. Kritik terhadap pers Amerika adalah sebagai berikut : pers Amerika yang diwakili oleh keempat media cetak *New York Times*, *Washington Post*, *Wall Street Journal* dan *Time* dalam masa periode ini memegang peranan dalam menginterpretasikan politik negeri Amerika terhadap Indonesia. Kecuali *Time* yang mempunyai sikap yang bermusuhan, ketiga media lainnya tidak sekeras kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Eisenhower. Yang paling mengherankan adalah bahwa keempat media ini bersama-sama mengambil kesimpulan bahwa kekuatan anti-Sukarno mempunyai kesempatan yang kecil untuk dapat mengalahkan kekuatan Sukarno. Sekarang dengan terbukanya keterlibatan CIA seperti yang dikemukakan dalam buku Audrey dan George Kahin, keempat media ini mengetahui rencana-rencana Washington, apalagi setelah Alan Pope ditangkap. Keempat media ini tidak menunjukkan sikap kritisnya terhadap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin dengan hanya menunjukkan bahwa kekuatan anti-Sukarno lemah, media-media cetak ini berharap bahwa liputan ini akan dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pemerintah Amerika terhadap Indonesia. Namun rasanya terlambat karena liputan baru dimulai pada tahun 1958 pada waktu PRRI diproklamkan. Rancangan Eisenhower-Dulles mendukung gerakan anti-Sukarno sudah dimulai sejak Eisenhower menjadi presiden namun semua ini hanya ada dalam dokumen yang masih rahasia ("classified documents"). Memang baru terlihat kiprahnya pada waktu ini dapat menjadi alasan mengapa pers Amerika tidak berperan lebih aktif, yaitu dengan memberitakan kepada publik akibat yang merugikan bagi pemerintah Amerika dan menguntungkan pihak komunis internasional dan komunis di Indonesia, satu hal yang terjadi akibat dari sikap "membiarkan" dan sikap "menonton" ini yaitu bahwa ada satu babakan campur tangan Amerika terhadap Indonesia yang hasilnya tidak menguntungkan bagi Amerika. Dilihat dalam perspektif pasca Vietnam, pers Amerika sebagai institusi yang tersendiri dalam tahun 50'an belum sepenuhnya berfungsi untuk pembeberan kebenaran. Bagi Indonesia, hubungan kedua negara dalam masa Eisenhower mengangkat legitimasi pemerintahan Sukarno, dalam aspek baik dan buruknya.

Daftar Pustaka

- Allison, John M. *Ambassador from the Prairie or Allison Wonderland*.
Boston : Houghton Mifflin, 1973.
- Brands, H.W. *The Specter of Neutralism; The United States and the
Emergence of the Third World, 1947-1960*.
New York : Columbia UP, 1989.
- Cohen, Bernard C. *The Press and Foreign Policy*.
New Jersey : Princeton UP, 1963.
- Cottam, Martha L. "Responding To Revolution : Why Do They decide to
Intervene?" *Superpowers and Revolution*.
Ed. Jonathan R. Adelman. New York : Praeger, 1986.
- Dinsmore, Herman H. *All the News That Fits : A Critical Analysis of the
News and Editorial Contents of the New York Times*.
New York : Arlington House, 1969.
- Kahin, George McT., and Audrey R. Kahin. *Subversion As Foreign
Policy : The Secret Eisenhower and Dulles' Debacle in Indonesia*.
New York : The New Press, 1995
- Kluger, Richard. *The Paper : the Life and Death of the New York Herald
Tribune*. New York : Knopf, 1986.
- LaFeber, Walter. *The American Age : United States Foreign Policy at
Home and Abroad Since 1750*. New York : W.W. Norton, 1989.
- Noer, Thomas. "Cold War and Black Liberation. " *The Specter of
Neutralism : The United States and the Emergence of the Third
World, 1947-1960*. H.W. Brands. New York : Columbia UP,
1989.
- Paterson, Thomas G., Gary Clifford, and Kenneth J. Hagan. *American
Foreign Policy : A History Since 1900*. 2nd ed. Massachusetts :
D.C. Heath, 1983.

Rivers, William. *The Opinion Makers*.

Roberts, Chalmers. *In the Shadow of Power : The Story of Washington Post*. Washington, D.C : Seven Locks, 1989.

Rostow, W.W. *The Diffusion of Power : An Essay in Recent History*. New York : The Macmillan, 1972.

Sabir M. *Politik Bebas dan Aktif : Tantangan dan kesempatan*. Jakarta : C.V Haji Masagung, 1987

Artikel-artikel

Baker, Russell. "Fulbright Scores Foreign Policy," New York Times 21 June 1958:2

Baldwin, Hanson. "Governments and Armies : Indonesian Situation." New York Times 28 May 1958:7

"Brink of Revolt" Time 17 February 1958:35

Carmical, J.H "Big Oil Program" New York Times 6 October 1958 : 49, 51

"Challenge & Response." Time 24 February 1958 : 27-28

"Cherchez la Guerre." Time 7 April 1958:49

"Coward & Liar". Time 3 March 1958 : 28

Durdin, Tillman. "Indonesians Find Dissidence Costly." New York Times 3 June 1958 : 2

—."Indonesia Notes Better Ties." New York Times 12 June 1958 : 3

—."Peiping Offer Reported." New York Times 20 May 1958:19

—."U.S Flier Faces Indonesia Trial." New York Times 29 May 1958:7

"Flickering Out." Time 28 April 1958:32

"Full Control." Washington Post 17 March 1958:A2

Griffin, John "Java Bombs Three Rebel Strongholds." Washington Post 23 February 1958:1, A4.

"Hesitation Waltz." Time 21 April 1958:22

"Hired Killers." Time 12 May. 1958:33

"Indonesia : Business Gets Soviet Aid." New York Times 12 June 1958:21

"Indonesia's Rebellion Is No Cause For Alarm." Wall Street Journal 17 February 1958:1

"Indonesia Suspend Time Magazine Sales." Washington Post 27 March 1958:A5

"Indonesia." Time 10 March 1958: 18-22

"Java Seizes Two U.S Newsmen." Washington Post 24 March 1958:A1

"Java Claims Full Retreat of Rebels." Washington Post 31 March 1958:A1

Kalb, Bernard. "Army Curbs on Reds in Indonesia Hinted." New York Times 11 May 1958: 1,13

—."Chinese Holiday Bleak." New York Times 11 October 1958 : 10

—."Indonesian Army Curbs Four Parties." New York Times 6 September 1958:2

—."Indonesia Finds 'middle' Line Difficult One." New York Times 11 May 1958:4E

—."Indonesia Ousts Private US Unit Asia Foundation." New York Times 13 June 1958:5

—."Issue of Communism." New York Times 11 May 1958 : 4E

—."Rebels Get Planes." New York Times 11 May 1958 : 4E

—."Rebels Vc Communism." New York Times 11 May 1958 : 4E

—."Subandrio Sees Soviet Envoy." New York Times. 17 May 1958 :6

—."US Asks Jakarta to Weight Trucc." New York Times 17 May 1958 :1, 6

Kenworthy, E.W."Indonesia Finds US Tie Improved." New York Times 24 May 1958 : 1, 9

McIntyre, A.M."250 Americans Fleeing Medan Battle." Washington Post 19 March 1958 : A1

Miller, William. "Americans Return." Washington Post 23 March 1958 : A1

—."Java Seizes Two US Newsmcn." Washington Post 24 March 1958 : A1

—."Java Summer Capital Bombed." Washington Post 23 March 1958 : A1

"Miscalculations." Time 28 April 1958 : 32

"Moving Center." Time 28 April 1958 : 32

"The Mystery Pilots." Time 12 May 1958 : 33

"Plain Citizen." Time 3 March 1958 : 25

"Rebels Giving Up." Washington Post 12 March 1958 : A1, 4

"Rebels Claim New Gains on Sumatra." Washington Post 16 March 1958 : 1

"Rebels set up Rival State." Washington Post 16 Februari 1958 : 1, 4

"Rebels Take Sumatra Base." Washington Post 17 March 1958 : A1, 2

Roderick, John. "Sukarno Reported to Weed Quick Victory."
Washington Post 12 March 1958 : A1, 4

Schmidt, Dana Adams. "Transcript of the Dulles News Conference on Policies." New York Times 21 May 1958 : 18

"SEATO : Mature Four-Year Old." Time 24 March 1958 : 27-28

"Shooting War." Time 3 March 1958 : 25

"Shrinking Perimeter." Time 7 April 1958 : 30

"Subandrio Meets US Envoy." New York Times 31 May 1958 : 7

"The Ultimatum." Time 3 February 1958 : 27

"Waiting Game." Time 31 March 1958 : 31

"Which Way The Lion." Time 3 February 1958 : 27

"Winkmanship." Time 2 June 1958 : 27